



PERAN DAN FUNGSI BAHASA BELANDA DALAM SEJARAH INDONESIA

*The Role And Function Of The Dutch Language In Indonesian History Of The Dutch Language
In Indonesia*

Nazwa Artika Desi
Universitas Pertahanan RI
(artikadesinazwa@gmail.com)

Abstract

The Dutch language played a significant role in Indonesian history, particularly during the VOC period and the Dutch East Indies administration. It functioned not only as a means of communication but also as an instrument of power in administration, law, education, trade, and diplomacy. This study aims to analyze the role and functions of the Dutch language in Indonesian history and its impact on linguistic development and the formation of national identity. The research employs a historical method with a qualitative approach, consisting of heuristic research, source criticism, interpretation, and historiography. The data sources include colonial archives, legal documents, Dutch-language newspapers, as well as relevant books and scholarly journals. The findings indicate that Dutch served as the official colonial language that created social and educational stratification, while simultaneously giving rise to an educated indigenous elite who used the language as a medium for intellectual resistance and nationalist movements. After Indonesian independence, the use of Dutch declined sharply along with the establishment of Indonesian as the national language, although Dutch remains limitedly used in legal and academic fields. Thus, the Dutch language represents a colonial legacy with lasting historical and academic significance in the study of Indonesian history.

Keywords: *Dutch language, colonialism, Indonesian history, VOC, linguistics*

Abstrak

Bahasa Belanda memiliki peran penting dalam sejarah Indonesia, terutama pada masa kolonial VOC dan pemerintahan Hindia Belanda. Bahasa ini tidak hanya digunakan sebagai alat komunikasi, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen kekuasaan dalam bidang administrasi, hukum, pendidikan, perdagangan, dan diplomasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan fungsi bahasa Belanda dalam sejarah Indonesia serta dampaknya terhadap perkembangan bahasa dan pembentukan identitas nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah metode sejarah dengan pendekatan kualitatif, meliputi tahapan heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Sumber penelitian terdiri atas arsip kolonial, dokumen hukum, surat kabar berbahasa Belanda, serta buku dan jurnal ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahasa Belanda berperan sebagai bahasa resmi kolonial yang menciptakan stratifikasi sosial dan pendidikan, namun sekaligus melahirkan elite terdidik pribumi yang memanfaatkan bahasa tersebut sebagai sarana perjuangan intelektual dan perlawanan terhadap kolonialisme. Pasca kemerdekaan, penggunaan bahasa Belanda mengalami penurunan



drastis seiring dengan penguatan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, meskipun tetap digunakan secara terbatas dalam bidang hukum dan akademik. Dengan demikian, bahasa Belanda merupakan warisan kolonial yang memiliki pengaruh historis dan akademik penting dalam kajian sejarah Indonesia.

Kata Kunci: Bahasa Belanda, Kolonialisme, Sejarah Indonesia, VOC, Kebahasaan

1. Pendahuluan

Indonesia memiliki sejarah perkembangan yang cukup panjang. Latar belakang keberagaman menjadi keunikan tersendiri bagi bangsa Indonesia. Sejak zaman dahulu keberagaman budaya serta rempah-rempah yang dimiliki Indonesia menjadi daya tarik bafi bangsa di dunia, khususnya bangsa Eropa. Tidak dapat dipungkiri juga bahwa kemerdekaan Indonesia yang dirasakan pada saat ini adalah dampak dari adanya konolialisme yang pernah dilakukan bangsa Eropa di Indonesia, diantara dampak dari konolialisme adalah kemajuan teknologi, ekonomi dan bahkan bahasa yang menopang kehidupan bangsa Indonesia hingga saat ini. Menurut Ricklefs, pada Juni 1596, kapal-kapal Belanda di bawah kepemimpinan Cornelis De Houtman berlabuh di Banten. Hal tersebut menjadi cikal bakal bentuk konolialisme di Indonesia. Namun, ada satu hal yang mencolok yang membedakan Indonesia dengan negara koloni Eropa yang lain, perbedaan tersebut terletak pada penggunaan bahasa.

Bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi dirinya (Kamus Besar Bahasa Indonesia), namun lebih jauh bahasa adalah alat untuk berinteraksi, dalam arti alat untuk menyampaikan pikiran, gagasan konsep dan perasaan. Adapun pengertian bahasa menurut beberapa para ahli: 1) Keraf (1994:1 dalam Ragam, 2014) Menerangkan bahwa mengingat pentingnya bahasa sebagai alat komunikasi memperhatikan wujud bahasa itu sendiri, kita dapat membatasi pengertian bahasa sebagai alat komunikasi antara masyarakat berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. 2) Kridalaksana (dalam Chaer, 2007:32; Ragam, 2014) Mengemukakan definisi tentang bahasa yaitu bahwa bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasikan diri. 3) Brown (2000:5 dalam Ragam, 2014) Mengidentifikasikan bahwa dari berbagai definisi bahasa yang ada, termuat dalam ringkasan definisi berikut ini: 1). Bahasa itu sistematis, 2). Bahasa adalah



satuan arbiter, 3). Bahasa tidak hanya tentang bunyi, namun juga dapat divisualisasikan, 4). Bahasa sebagai simbol yang secara konvensional memiliki arti, 5). Bahasa digunakan untuk berkomunikasi, 6). Bahasa sebagai alat berbicara dalam suatu masyarakat dan budaya, 7). Bahasa pada dasarnya adalah untuk manusia, 8). Bahasa dapat diterima oleh seluruh masyarakat dengan cara yang sama, bahasa dan pembelajaran bahasa keduanya memiliki karakteristik yang universal. 4) Martinet (1987 dalam Ragam, 2014) Menerangkan bahwa bahasa adalah sebuah alat komunikasi untuk menganalisis pengalaman manusia, secara berbeda didalam setiap masyarakat, dalam satuan-satuan yang mengandung isi semantik dan pengungkapan bunyi, yaitu monem.

Selain digunakan untuk alat komunikasi bahasa juga digunakan sebagai alat dominasi dan kontrol, karena berperan pula sebagai instrumen yang mampu mengatur, membentuk, dan memengaruhi perilaku individu maupun kelompok dalam masyarakat. Dalam kerangka teori *sociolinguistik*, bahasa lebih dari sekadar medium komunikasi ia memiliki fungsi sosial yang lebih mendalam, termasuk sebagai alat kontrol sosial. Penggunaan bahasa dalam berbagai konteks seperti media massa, pendidikan, dan politik dapat menciptakan dan memperkuat struktur kekuasaan, membentuk identitas kolektif, serta memengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakat.

Penelitian ini berfokus pada analisis jejak historis serta mengkaji peran dan fungsi bahasa Belanda dalam berbagai aspek sejarah Indonesia. Karena tidak dapat dipungkiri bahasa Belanda berperan signifikan di era kolonial sebagai alat kekuasaan modernisasi, tetapi secara sadar digantikan demi kemerdekaan identitas nasional, meninggalkan jejaknya terutama dalam bidang-bidang spesifik yang berhubungan dengan masa lalu kolonial.

2. Metode Penelitian

2.1. Metode dan Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah dengan pendekatan kualitatif. Metode sejarah dipilih untuk mengkaji peran dan fungsi Bahasa Belanda dalam konteks kolonial di Indonesia melalui tahapan heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi.



a. Heuristik

Tahap heuristik dilakukan dengan mengumpulkan sumber-sumber sejarah yang relevan dengan fokus penelitian. Sumber primer berupa arsip pemerintahan kolonial Hindia Belanda, dokumen hukum, buku, serta surat kabar berbahasa Belanda. Sumber sekunder diperoleh dari buku sejarah, jurnal ilmiah, dan karya akademik yang membahas kolonialisme dan kebahasaan. Tahap ini bertujuan memperoleh data faktual mengenai penggunaan Bahasa Belanda dalam bidang pemerintahan, pendidikan, hukum, dan sosial.

a. Kritik Sumber

Kritik sumber dilakukan untuk menilai keabsahan dan kredibilitas sumber yang telah dikumpulkan. Kritik eksternal digunakan untuk menguji keaslian sumber berdasarkan asal-usul, waktu, dan penulis dokumen, sedangkan kritik internal dilakukan untuk menilai isi sumber agar terhindar dari kesalahan fakta dan bias kolonial. Tahap ini memastikan validitas data yang digunakan dalam penelitian.

b. Interpretasi

Interpretasi merupakan tahap analisis dan penafsiran data sejarah yang telah lolos kritik sumber. Pada tahap ini, peneliti mengkaji makna dan fungsi Bahasa Belanda sebagai bahasa administrasi kolonial, sarana pendidikan bagi kelompok tertentu, serta pengaruhnya terhadap pembentukan kosakata dan struktur Bahasa Indonesia. Analisis dilakukan dengan mengaitkan data sejarah dengan konteks sosial dan politik masa kolonial.

c. Historiografi

Historiografi merupakan tahap penyusunan hasil penelitian dalam bentuk tulisan ilmiah yang sistematis dan kronologis. Pada tahap ini, peneliti menyajikan hasil interpretasi secara runtut dan argumentatif sehingga menghasilkan narasi sejarah yang ilmiah mengenai peran dan fungsi Bahasa Belanda dalam sejarah Indonesia.



3. Hasil dan Diskusi

Sejarah Awal Masuknya Bahasa Belanda di Nusantara

- VOC sebagai pintu masuk bahasa Belanda

Kedatangan *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC) ke Nusantara pada awal abad ke-17 menandai awal masuknya bahasa Belanda ke wilayah Indonesia. VOC yang didirikan pada tahun 1602 tidak hanya berfungsi sebagai perusahaan dagang, tetapi juga memiliki kewenangan politik dan administratif layaknya sebuah negara. Kewenangan ini memungkinkan VOC menjalankan pemerintahan kolonial di wilayah-wilayah kekuasaannya, sehingga bahasa Belanda dijadikan bahasa resmi dalam seluruh aktivitas kelembagaan.

Vereenigde Oostindische Compagnie atau yang sering disebut juga sebagai VOC dimana merupakan sebuah perusahaan kongsi dagang Belanda yang berbadan hukum juga diberi hak istimewa oleh pihak kerajaan Belanda itu sendiri bak sebuah negara berdaulat dan memiliki kekayaan terbesar sepanjang sejarah dan didirikan pada 20 maret 1602, dengan tujuan untuk melakukan monopoli perdagangan di wilayah Hindia-Timur yang berfokus kepada penjualan rempah-rempah.

Dalam bidang perdagangan, bahasa Belanda digunakan sebagai bahasa utama dalam penyusunan kontrak dagang, pencatatan transaksi, laporan keuangan, dan arsip pelayaran. Setiap perjanjian antara VOC dan penguasa lokal ditulis dalam bahasa Belanda, meskipun sering disertai terjemahan dalam bahasa setempat atau bahasa Melayu. Kondisi ini menempatkan bahasa Belanda sebagai bahasa yang memiliki otoritas hukum dan legitimasi kekuasaan.

Dalam bidang administrasi dan pemerintahan, bahasa Belanda berfungsi sebagai bahasa resmi untuk surat-menyurat antarpejabat VOC, pembuatan peraturan, dan pencatatan hukum. Para pejabat pribumi yang bekerja dalam struktur VOC, seperti juru tulis, penerjemah, dan bangsawan lokal, dituntut untuk memahami bahasa Belanda agar dapat menjalankan tugas administratif. Dengan demikian, bahasa Belanda mulai diperkenalkan kepada kelompok elite pribumi sebagai sarana komunikasi formal.

VOC juga berperan dalam penyebaran bahasa Belanda melalui pendidikan,



meskipun bersifat terbatas. Sekolah-sekolah yang didirikan VOC pada umumnya ditujukan bagi anak-anak Eropa dan kalangan elite pribumi. Bahasa Belanda digunakan sebagai bahasa pengantar, sehingga penguasaan bahasa ini menjadi simbol status sosial dan akses terhadap kekuasaan kolonial. Masyarakat pribumi pada umumnya tidak memiliki kesempatan yang sama untuk mempelajari bahasa Belanda, sehingga terjadi ketimpangan *linguistik*.

Selain itu, keberadaan penerjemah (*tolk*) dan juru tulis dalam administrasi VOC menunjukkan proses awal kontak bahasa antara bahasa Belanda dan bahasa lokal. Melalui proses ini, sejumlah kosakata Belanda mulai diserap ke dalam bahasa Melayu, yang kelak menjadi dasar bahasa Indonesia. Kosakata tersebut terutama berkaitan dengan bidang administrasi, hukum, militer, dan ekonomi.

Secara keseluruhan, VOC berfungsi sebagai pintu masuk utama bahasa Belanda di Indonesia dengan menjadikannya bahasa kekuasaan, administrasi, dan pendidikan bagi kalangan tertentu. Peran VOC ini tidak hanya berdampak pada masa kekuasaannya, tetapi juga berlanjut pada periode Hindia Belanda dan meninggalkan warisan *linguistik* yang masih terlihat dalam bahasa Indonesia modern hingga saat ini.

- Interaksi awal dengan bahasa Melayu sebagai *lingua franca*

Sebelum kedatangan bangsa Eropa, bahasa Melayu telah berfungsi sebagai *lingua franca* di wilayah Nusantara. Bahasa ini digunakan secara luas sebagai bahasa perdagangan, diplomasi, dan komunikasi antarwilayah, terutama di pelabuhan-pelabuhan utama. Ketika VOC mulai beroperasi di Indonesia pada awal abad ke-17, kondisi *linguistik* ini mendorong VOC untuk menggunakan bahasa Melayu sebagai sarana komunikasi awal dengan masyarakat lokal.

Bahasa Melayu adalah sebagai bahasa pengantar atau sebagai sarana komunikasi umum bagi para etnik yang ada di kawasan ini. Bahasa Melayu menjadi bahasa pengantar di berbagai bidang seperti perdagangan, pendidikan, teknologi, politik dan lain-lainnya di Nusantara. Hal ini terjadi sejak awal adanya kontak budaya antara berbagai etnik di Alam Melayu-Polinesia (kadang kala disebut juga Melayu-Austronesia), dalam rangka berkomunikasi secara sosial. Melayu sebagai faktor pemersatu bahasa di rantau ini,



menurut penulis mengalami perkembangan-perkembangan yang baik, bagi integrasi masyarakat di Dunia Melayu atau kadang disebut Nusantara. Perkembangannya mencakup bukan saja aspek bahasa, tetapi Melayu juga merupakan faktor pemersatu kebudayaan, yang mencakup berbagai bidang kehidupan manusia. Melayu menyumbang integrasi sosial melalui busana, makanan, seni tari, seni musik, pola pikiran dan filsafat, dan lain-lain.

Namun Melayu juga tetap menghargai kebudayaan etnik di Rantau Melayu untuk tumbuh dan berkembang selaras dengan perkembangan budaya di kawasan ini dan tidak lupa dengan perkembangan globalisasi. Yang penting bagi masyarakat di Nusantara, mereka sadar akan perbedaan dan terdapat pula unsur pemersatu mereka. Bagi penulis, peradaban pemersatu yang paling menonjol di Nusantara adalah budaya Melayu. Dengan polarisasi yang sedemikian rupa, penulis memerikan kenyataan sosial dan budaya yang seperti ini sebagai *cultura franca*. Dunia Melayu secara faktual dan historis telah menunjukkan eksistensinya yang begitu matang menjadi peradaban (tamadun) terdepan di Nusantara. Dunia Melayu ini merangkumi kawasan-kawasan induknya di Asia Tenggara, yang kini terdiri dari negara-negara seperti: Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Brunai Darussalam, Filipina, dan juga sebilangan masyarakat Melayu di Kamboja (*Kampuchea*), Myanmar, Laos, dan lainnya.

Dalam praktik perdagangan, bahasa Melayu digunakan VOC untuk berinteraksi dengan pedagang pribumi, penguasa lokal, dan kelompok etnis lainnya. Penggunaan bahasa Melayu dinilai lebih efektif dibandingkan bahasa Belanda karena telah dipahami oleh berbagai lapisan masyarakat. Oleh sebab itu, pada tahap awal, VOC lebih mengandalkan bahasa Melayu dalam transaksi dagang, negosiasi harga, dan penyampaian informasi di lapangan.

Meskipun demikian, bahasa Melayu tidak menggantikan posisi bahasa Belanda dalam struktur kolonial VOC. Bahasa Melayu berfungsi sebagai bahasa perantara dalam komunikasi sehari-hari dan hubungan informal, sedangkan bahasa Belanda tetap digunakan dalam administrasi resmi, peraturan hukum, dan dokumentasi pemerintahan. Pembagian fungsi ini menciptakan situasi diglosia, di mana bahasa Melayu menempati



ranah komunikasi praktis, sementara bahasa Belanda menempati ranah kekuasaan dan legitimasi hukum.

Interaksi intensif antara bahasa Melayu dan bahasa Belanda melalui peran bahasa Melayu sebagai *lingua franca* menyebabkan terjadinya kontak bahasa yang berkelanjutan. Dalam proses ini, banyak kosakata Belanda diserap ke dalam bahasa Melayu, terutama dalam bidang administrasi, perdagangan, hukum, dan teknologi. Penyerapan tersebut memperkaya bahasa Melayu dan menjadi salah satu fondasi penting bagi perkembangan bahasa Indonesia modern. Dengan demikian, interaksi awal VOC dengan bahasa Melayu sebagai *lingua franca* menunjukkan bahwa penyebaran bahasa Belanda di Indonesia tidak terjadi secara langsung, melainkan melalui medium bahasa Melayu yang telah mapan. Peran bahasa Melayu sebagai bahasa perantara ini menjadikannya jembatan utama dalam proses kontak *linguistik* antara masyarakat Nusantara dan penguasa kolonial Belanda.

Di sisi lain, Bahasa Melayu yang telah lama menjadi *lingua franca* di Nusantara diperlakukan sebagai bahasa kelas dua yang hanya layak untuk pendidikan tingkat dasar dan komunikasi dengan masyarakat pribumi yang tidak berpendidikan tinggi (Syarifah et al., 2024). Strategi diferensiasi *linguistik* ini secara sistematis memecah belah masyarakat pribumi menjadi kelompok-kelompok yang terpisah berdasarkan kemampuan berbahasa, yang pada gilirannya memperkuat politik *divide et impera* Belanda dalam mengendalikan wilayah jajahannya (Karina et al., 2024).

Kelompok elit terdidik yang telah menikmati privilege pendidikan berbahasa Belanda berada dalam posisi dilematis antara mempertahankan status sosial mereka yang terkait dengan penguasaan bahasa kolonial atau mendukung demokratisasi pendidikan melalui penggunaan Bahasa Melayu yang lebih mudah diakses oleh masyarakat luas (Sinaga et al., 2024). Konflik ini semakin kompleks ketika pemerintah kolonial menyadari bahwa perluasan pendidikan berbahasa Belanda dapat membahayakan stabilitas politik karena menciptakan terlalu banyak pribumi terdidik yang berpotensi menantang kekuasaan kolonial, namun di sisi lain, pembatasan pendidikan akan menghambat kebutuhan birokrasi akan tenaga administrasi (Firdiyansyah, 2024). Dinamika inilah yang kemudian membentuk lanskap pendidikan kolonial pada periode tersebut, di mana



pertarungan antara dua bahasa sesungguhnya merepresentasikan pertarungan yang lebih besar antara kepentingan kolonial dan aspirasi pembebasan nasional (Faturrohman et al., 2025).

Di sisi lain, penetapan Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar bagi sekolah-sekolah pribumi tingkat rendah dan Sekolah Rakyat menunjukkan strategi kolonial yang berbeda namun tetap dalam kerangka kontrol sosial yang sama. Bahasa Melayu dipilih bukan karena penghargaan terhadap bahasa lokal, melainkan karena pertimbangan pragmatis bahwa bahasa ini telah menjadi *lingua franca* di Nusantara dan relatif mudah dipahami oleh berbagai kelompok etnis, sehingga efisien untuk komunikasi dasar dan instruksi kerja (Syarifah et al., 2024). Namun demikian, penggunaan Bahasa Melayu dalam konteks pendidikan rendah secara implisit menempatkannya sebagai bahasa kelas dua yang tidak memadai untuk pendidikan tinggi atau diskursus intelektual yang serius (Faturrohman et al., 2025). Pemerintah kolonial dengan sengaja membatasi pengembangan Bahasa Melayu dalam ranah pendidikan formal tingkat lanjut dan tidak pernah menyediakan literatur ilmiah atau buku teks berkualitas dalam Bahasa Melayu untuk jenjang menengah dan tinggi, sehingga menciptakan ketergantungan struktural terhadap Bahasa Belanda bagi siapa pun yang ingin melanjutkan pendidikan atau mengejar karir profesional (Rosmaida et al., 2025).

Tujuan utama dari dualisme kebijakan bahasa ini adalah untuk melanggengkan kontrol sosial dan memelihara dominasi kolonial melalui pembatasan mobilitas sosial vertikal bagi mayoritas pribumi. Dengan menciptakan sistem di mana hanya segelintir orang yang dapat menguasai Bahasa Belanda dan mengakses pendidikan berkualitas, pemerintah kolonial memastikan bahwa kelompok elit terdidik tidak akan menjadi terlalu besar sehingga mudah dikontrol dan diarahkan untuk melayani kepentingan kolonial (Karina et al., 2024). Strategi ini sekaligus mencegah munculnya massa kritis intelektual pribumi yang dapat mengorganisir perlawanan terhadap penjajahan, karena mayoritas rakyat tetap berada dalam kondisi pendidikan rendah dan terfragmentasi berdasarkan bahasa daerah masing-masing tanpa alat komunikasi yang efektif untuk membangun solidaritas lintas etnis (Pasaribu et al., 2024). Kebijakan bahasa dengan demikian menjadi



instrumen yang sangat halus namun efektif untuk memecah belah masyarakat pribumi, di mana mereka yang berbahasa Belanda merasa superior dan terpisah dari sesama pribumi yang hanya menguasai Bahasa Melayu atau bahasa daerah, sehingga sulit membangun kesatuan politik yang diperlukan untuk menantang kekuasaan kolonial (Firdiyansyah, 2024).

- Peran bahasa Belanda dalam perdagangan dan diplomas

Pada masa kekuasaan *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC), bahasa Belanda memegang peranan penting dalam kegiatan perdagangan dan diplomasi kolonial. Sebagai perusahaan dagang yang diberi kewenangan politik, VOC menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa resmi dalam pengelolaan aktivitas ekonomi dan hubungan politik dengan penguasa lokal maupun kekuatan asing lainnya.

Dalam bidang perdagangan, bahasa Belanda digunakan secara sistematis dalam penyusunan kontrak dagang, pencatatan transaksi, laporan keuangan, dan arsip pelayaran. Setiap perjanjian perdagangan antara VOC dan mitra dagang, baik penguasa lokal maupun pedagang asing, dibuat dalam bahasa Belanda sebagai bahasa hukum yang memiliki kekuatan mengikat. Hal ini menempatkan bahasa Belanda sebagai alat legitimasi ekonomi dan kontrol perdagangan, karena isi perjanjian dan aturan dagang sepenuhnya berada dalam kerangka bahasa dan hukum kolonial.

Dalam praktik diplomasi, bahasa Belanda berfungsi sebagai bahasa formal dalam negosiasi politik, perjanjian kekuasaan, dan hubungan internasional. VOC menggunakan bahasa Belanda dalam komunikasi resmi dengan kerajaan-kerajaan Nusantara, seperti dalam perjanjian monopoli perdagangan, pengaturan wilayah, dan pengakuan kekuasaan. Meskipun dalam beberapa kasus digunakan bahasa Melayu atau penerjemah sebagai perantara, versi resmi dan sah dari perjanjian tersebut tetap ditulis dalam bahasa Belanda.

Selain itu, penggunaan bahasa Belanda dalam perdagangan dan diplomasi menciptakan ketergantungan elite lokal terhadap struktur kolonial VOC. Para penguasa dan pejabat pribumi yang terlibat dalam hubungan dagang dan diplomatik dituntut untuk memahami bahasa Belanda atau bergantung pada penerjemah yang berada di



bawah kontrol VOC. Kondisi ini memperkuat posisi dominan VOC dalam menentukan isi perjanjian dan arah kebijakan ekonomi serta politik.

Dengan demikian, bahasa Belanda tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi dalam perdagangan dan diplomasi, tetapi juga sebagai instrumen kekuasaan kolonial. Melalui bahasa Belanda, VOC mampu mengendalikan mekanisme perdagangan dan membangun hubungan diplomatik yang menguntungkan kepentingan kolonial, sekaligus memperkuat dominasi politik dan ekonomi di wilayah Nusantara.

Bahasa Belanda dalam Pendidikan

- Sekolah Eropa dan sekolah pribumi elit menggunakan bahasa Belanda

Pada awal abad ke-20, sistem pendidikan kolonial Hindia Belanda mengalami transformasi signifikan yang tidak terlepas dari kepentingan politik dan ekonomi pemerintah kolonial. Perubahan ini ditandai dengan munculnya Politik Etis yang dicanangkan sejak tahun 1901, membawa semangat baru dalam penyelenggaraan pendidikan bagi masyarakat pribumi meskipun dalam praktiknya tetap melanggengkan stratifikasi sosial yang telah ada (Rosmaida et al., 2025). Sistem pendidikan yang dikembangkan Belanda pada masa ini secara struktural menciptakan hierarki yang jelas berdasarkan latar belakang sosial dan ekonomi, di mana akses terhadap pendidikan berkualitas tinggi hanya terbuka bagi golongan elit pribumi dan anak-anak Eropa (Sinaga et al., 2024). Kondisi ini mencerminkan bagaimana pendidikan kolonial tidak semata-mata bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, melainkan lebih sebagai instrumen untuk menghasilkan tenaga kerja terdidik yang dapat mengisi posisi administratif dalam birokrasi kolonial tanpa mengancam supremasi kekuasaan Belanda (Firdiyansyah, 2024).

Dalam konteks kolonialisme, bahasa berfungsi jauh melampaui perannya sebagai alat komunikasi semata, melainkan menjadi instrumen politik yang ampuh untuk mempertahankan dominasi dan mengatur tatanan sosial. Bahasa Belanda diposisikan sebagai bahasa prestise yang menjadi penanda kelas sosial tinggi dan pintu gerbang menuju mobilitas vertikal dalam struktur birokrasi kolonial (Faturrohman et al., 2025).

Memasuki dekade 1920-an, ketegangan antara penggunaan Bahasa Belanda dan Bahasa Melayu dalam sistem pendidikan mencapai puncaknya seiring dengan



menguatnya kesadaran nasional di kalangan cendekiawan pribumi. Perdebatan mengenai bahasa pengantar pendidikan tidak hanya berdimensi pedagogis, tetapi juga politis karena menyangkut pertanyaan fundamental tentang identitas, akses terhadap pengetahuan, dan masa depan masyarakat pribumi (Pasaribu et al., 2024). Kelompok elit terdidik yang telah menikmati privilege pendidikan berbahasa Belanda berada dalam posisi dilematis antara mempertahankan status sosial mereka yang terkait dengan penguasaan bahasa kolonial atau mendukung demokratisasi pendidikan melalui penggunaan Bahasa Melayu yang lebih mudah diakses oleh masyarakat luas (Sinaga et al., 2024). Konflik ini semakin kompleks ketika pemerintah kolonial menyadari bahwa perluasan pendidikan berbahasa Belanda dapat membahayakan stabilitas politik karena menciptakan terlalu banyak pribumi terdidik yang berpotensi menantang kekuasaan kolonial, namun di sisi lain, pembatasan pendidikan akan menghambat kebutuhan birokrasi akan tenaga administrasi (Firdiyansyah, 2024). Dinamika inilah yang kemudian membentuk lanskap pendidikan kolonial pada periode tersebut, di mana pertarungan antara dua bahasa sesungguhnya merepresentasikan pertarungan yang lebih besar antara kepentingan kolonial dan aspirasi pembebasan nasional (Faturrohman et al., 2025).

Penetapan Bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar sekolah-sekolah elite merupakan keputusan politik yang diperhitungkan dengan matang oleh pemerintah kolonial Belanda. Kebijakan ini berakar pada kebutuhan kolonial untuk menciptakan kelas perantara yang dapat menjembatani komunikasi antara penguasa Eropa dan pribumi. Dengan menjadikan Bahasa Belanda sebagai prasyarat untuk mengakses pendidikan tinggi dan jabatan pemerintahan, kolonial secara efektif menciptakan sistem meritokrasi semu di mana kesempatan untuk naik kelas sosial secara formal terbuka bagi pribumi. Politik bahasa ini juga mencerminkan pandangan superioritas budaya Eropa yang menganggap bahwa hanya melalui penguasaan bahasa dan kebudayaan Belanda seseorang dapat menjadi beradab dan layak menduduki posisi dalam administrasi modern (Sinaga et al., 2024)

- Bahasa Belanda sebagai syarat masuk pendidikan tinggi

Pada masa kolonial Belanda, khususnya sejak periode VOC hingga Hindia Belanda,



pendidikan menjadi salah satu sarana utama penyebaran bahasa Belanda di Indonesia. Sekolah- sekolah yang didirikan pemerintah kolonial dibedakan berdasarkan ras dan status sosial, sehingga penggunaan bahasa Belanda dalam pendidikan bersifat terbatas dan *eksklusif*.

Sekolah Eropa didirikan khusus untuk anak-anak bangsa Eropa, terutama Belanda. Dalam sekolah ini, bahasa Belanda digunakan sepenuhnya sebagai bahasa pengantar dalam proses belajar-mengajar, baik dalam mata pelajaran akademik maupun dalam komunikasi sehari-hari di lingkungan sekolah. Kurikulum yang diterapkan berorientasi pada sistem pendidikan di Belanda, sehingga bahasa Belanda menjadi alat utama transfer ilmu pengetahuan, nilai budaya, dan identitas kolonial.

Selain sekolah Eropa, pemerintah kolonial juga membuka sekolah bagi kalangan pribumi elit, seperti anak-anak bangsawan, pejabat pemerintah lokal, dan keluarga yang bekerja sama dengan kolonial. Sekolah-sekolah ini, antara lain sekolah kelas satu (*eerste klasse scholen*), menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar utama atau pendamping. Tujuan pendirian sekolah ini adalah untuk mencetak tenaga administrasi pribumi yang mampu membantu jalannya pemerintahan kolonial.

Penggunaan bahasa Belanda dalam sekolah pribumi elit menciptakan kesenjangan pendidikan dan sosial. Hanya kelompok tertentu yang memiliki akses terhadap pendidikan berbahasa Belanda, sehingga penguasaan bahasa tersebut menjadi simbol status sosial dan alat mobilitas sosial. Sementara itu, sebagian besar masyarakat pribumi tetap memperoleh pendidikan dasar dengan bahasa pengantar bahasa daerah atau Melayu, atau bahkan tidak mengenyam pendidikan sama sekali.

Dengan demikian, sekolah Eropa dan sekolah pribumi elit berperan penting dalam memperkuat posisi bahasa Belanda sebagai bahasa resmi, bahasa pendidikan, dan bahasa kekuasaan. Melalui jalur pendidikan yang bersifat diskriminatif ini, bahasa Belanda ditanamkan sebagai alat kontrol kolonial sekaligus sarana pembentukan elite terdidik yang loyal terhadap pemerintahan kolonial.

- Tokoh- tokoh pergerakan nasional yang menguasai bahasa Belanda

Pada masa kolonial, penguasaan bahasa Belanda menjadi salah satu faktor penting



dalam pembentukan kaum terpelajar pribumi yang kemudian memimpin pergerakan nasional Indonesia. Bahasa Belanda berfungsi sebagai bahasa pendidikan tinggi, administrasi, dan ilmu pengetahuan, sehingga kemampuan berbahasa Belanda memungkinkan tokoh-tokoh pergerakan nasional mengakses gagasan modern, pemikiran politik Barat, serta literatur tentang demokrasi, nasionalisme, dan hak asasi manusia.

Salah satu tokoh penting adalah Raden Ajeng Kartini, yang menguasai bahasa Belanda melalui pendidikan dan pergaulannya dengan kalangan Eropa. Kartini menggunakan bahasa Belanda untuk menulis surat-surat yang berisi kritik terhadap ketidakadilan kolonial, khususnya dalam bidang pendidikan dan emansipasi perempuan. Pemikiran Kartini yang dituangkan dalam bahasa Belanda kemudian dihimpun dalam buku *Door Duisternis tot Licht*, yang menjadi inspirasi gerakan sosial di Indonesia.

Dr. Cipto Mangunkusumo merupakan tokoh pergerakan nasional yang juga menguasai bahasa Belanda dengan baik. Sebagai lulusan pendidikan kedokteran kolonial, ia menggunakan bahasa Belanda dalam tulisan-tulisan kritis dan aktivitas politiknya. Penguasaan bahasa Belanda memungkinkan Cipto menyampaikan kritik secara langsung kepada pemerintah kolonial melalui media cetak dan forum resmi.

Tokoh lainnya adalah Ki Hadjar Dewantara, yang menggunakan bahasa Belanda dalam artikel terkenal berjudul *Als Ik Eens Nederlander Was* (Seandainya Aku Seorang Belanda). Melalui tulisan ini, Ki Hadjar menyampaikan kritik tajam terhadap kebijakan kolonial Belanda, khususnya terkait perayaan kemerdekaan Belanda di tanah jajahan. Tulisan tersebut menunjukkan bahwa bahasa Belanda digunakan sebagai alat perlawanan intelektual terhadap kolonialisme.

Selain itu, Mohammad Hatta dan Soekarno juga menguasai bahasa Belanda melalui pendidikan tinggi yang mereka tempuh. Mohammad Hatta, yang menempuh pendidikan di Belanda, menggunakan bahasa Belanda dalam diskusi politik, tulisan ilmiah, dan organisasi pergerakan mahasiswa Indonesia di luar negeri. Sementara itu, Soekarno memanfaatkan penguasaan bahasa Belanda untuk membaca literatur politik, memahami sistem hukum kolonial, dan menyusun strategi pergerakan nasional.

Dengan demikian, penguasaan bahasa Belanda oleh tokoh-tokoh pergerakan



nasional tidak hanya berfungsi sebagai alat pendidikan, tetapi juga sebagai sarana perjuangan. Bahasa Belanda digunakan untuk mengkritik kolonialisme, menyebarkan gagasan nasionalisme, dan membangun kesadaran politik masyarakat. Dalam konteks ini, bahasa Belanda berperan sebagai medium yang memungkinkan kaum terpelajar pribumi menantang dominasi kolonial dengan menggunakan bahasa penguasa itu sendiri.

Bahasa Belanda pasca kemerdekaan

- Penurunan drastis penggunaan bahasa Belanda

Penurunan drastis penggunaan bahasa Belanda di Indonesia terjadi terutama pada paruh pertama abad ke-20, seiring dengan perubahan politik, sosial, dan kebahasaan yang mendasar. Bahasa Belanda yang sebelumnya berfungsi sebagai bahasa administrasi, pendidikan tinggi, dan elit kolonial, secara bertahap kehilangan kedudukannya setelah runtuhnya kekuasaan kolonial Belanda.

Faktor utama penurunan penggunaan bahasa Belanda adalah kebangkitan nasionalisme Indonesia. Sejak Sumpah Pemuda tahun 1928, bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa persatuan dan simbol identitas nasional. Pilihan terhadap bahasa Indonesia secara sadar menolak bahasa kolonial sebagai bahasa resmi bangsa yang merdeka, sehingga peran bahasa Belanda mulai tersisih dari kehidupan publik.

Selain itu, pendudukan Jepang (1942–1945) memberikan dampak signifikan terhadap penggunaan bahasa Belanda. Pemerintah pendudukan Jepang melarang penggunaan bahasa Belanda dalam administrasi, pendidikan, dan media massa. Bahasa Jepang dan bahasa Indonesia diperkenalkan sebagai pengganti, yang secara efektif memutus kesinambungan penggunaan bahasa Belanda dalam institusi formal.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tahun 1945, pemerintah Indonesia secara resmi menggantikan bahasa Belanda dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia digunakan dalam pemerintahan, pendidikan, perundang-undangan, dan komunikasi resmi. Sistem pendidikan nasional tidak lagi menjadikan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar, sehingga generasi pascakemerdekaan tidak memiliki kebutuhan praktis untuk mempelajarinya.

Faktor lain yang turut mempercepat penurunan penggunaan bahasa Belanda adalah



perubahan orientasi pendidikan dan internasionalisasi. Bahasa asing yang dipelajari di sekolah-sekolah Indonesia bergeser ke bahasa Inggris, yang dianggap lebih relevan dalam konteks global. Bahasa Belanda kemudian diposisikan sebagai bahasa asing terbatas yang hanya dipelajari dalam bidang tertentu, seperti sejarah, filologi, dan studi arsip kolonial.

Akibat dari berbagai faktor tersebut, penggunaan bahasa Belanda di Indonesia mengalami penurunan drastis dan terbatas pada kalangan akademisi, peneliti, dan arsiparis. Meskipun demikian, jejak bahasa Belanda tetap bertahan dalam kosakata bahasa Indonesia, khususnya dalam bidang hukum, administrasi, dan teknik, sebagai warisan *linguistik* dari masa kolonial. Dengan demikian, penurunan drastis penggunaan bahasa Belanda mencerminkan perubahan besar dalam identitas nasional, sistem politik, dan orientasi kebahasaan Indonesia dari masyarakat kolonial menuju bangsa merdeka yang berdaulat secara bahasa.

Sebagai langkah strategis dalam membangun identitas nasional yang inklusif, Indonesia memilih bahasa Indonesia (bahasa Melayu) sebagai simbol persatuan nasional di tengah keberagaman etnis dan *linguistik*. Melalui pendekatan analisis historis-kualitatif, penelitian ini mengidentifikasi munculnya sentimen nasionalisme dan keinginan kuat untuk melepaskan diri dari warisan kolonial sebagai faktor utama penolakan terhadap bahasa Belanda sebagai bahasa resmi.

Memilih bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional membantu menciptakan identitas nasional yang kuat dan membedakan diri dari penjajah. Bahasa Belanda dianggap sebagai bahasa penjajah yang berkaitan dengan penindasan dan ketidakadilan selama masa kolonial. Menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional mempromosikan kesetaraan dan persatuan di antara berbagai suku dan etnis di Indonesia, menghindari asosiasi dengan masa lalu kolonial yang pahit.

Bahasa Melayu (yang kemudian berkembang menjadi bahasa Indonesia) sudah banyak digunakan oleh berbagai komunitas di Nusantara sebagai bahasa pergaulan.

Dengan demikian, bahasa ini lebih mudah diterima dan dipelajari oleh rakyat Indonesia daripada bahasa Belanda, yang lebih asing dan tidak digunakan secara luas di luar kalangan elite kolonial.



Mengadopsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional merupakan simbol perlawanan terhadap kolonialisme dan upaya untuk memerdekakan diri dari pengaruh penjajah. Ini adalah bentuk afirmasi identitas nasional yang mandiri dan bebas dari pengaruh asing.

- Tetap digunakan dalam bidang hukum dan akademik

Meskipun penggunaan bahasa Belanda di Indonesia mengalami penurunan drastis setelah kemerdekaan, bahasa ini tidak sepenuhnya ditinggalkan. Dalam bidang hukum dan akademik, bahasa Belanda tetap memiliki peran penting, terutama sebagai bahasa sumber dan rujukan utama yang berkaitan dengan warisan kolonial.

Dalam bidang hukum, banyak peraturan perundang-undangan Indonesia bersumber dari sistem hukum kolonial Belanda. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) merupakan adaptasi dari peraturan hukum Belanda yang awalnya ditulis dalam bahasa Belanda. Oleh karena itu, pemahaman terhadap istilah dan konsep hukum Belanda tetap diperlukan untuk menafsirkan makna asli pasal-pasal hukum tersebut. Bahasa Belanda masih digunakan dalam studi perbandingan hukum, penelusuran naskah asli undang-undang kolonial, dan analisis yuridis historis.

Dalam bidang akademik, bahasa Belanda digunakan terutama dalam penelitian sejarah, filologi, dan ilmu sosial. Arsip-arsip kolonial seperti laporan VOC, dokumen pemerintahan Hindia Belanda, surat-surat resmi, dan catatan administrasi sebagian besar ditulis dalam bahasa Belanda. Peneliti dan akademisi yang mengkaji sejarah Indonesia pada masa kolonial harus menguasai bahasa Belanda agar dapat mengakses sumber primer secara langsung dan akurat. Selain itu, sejumlah karya ilmiah klasik tentang Indonesia yang ditulis oleh sarjana Belanda masih menjadi rujukan penting dalam dunia akademik. Oleh karena itu, bahasa Belanda tetap diajarkan di beberapa perguruan tinggi di Indonesia, khususnya pada program studi sejarah, sastra, hukum, dan arsip. Penggunaan bahasa Belanda dalam konteks ini bersifat fungsional dan ilmiah, bukan sebagai bahasa komunikasi sehari-hari.

Dengan demikian, meskipun perannya telah menyempit, bahasa Belanda tetap



digunakan dalam bidang hukum dan akademik sebagai bahasa sumber yang penting untuk memahami sejarah, sistem hukum, dan perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Keberlangsungan penggunaan bahasa Belanda ini menunjukkan bahwa bahasa kolonial tersebut masih memiliki nilai strategis dalam konteks keilmuan dan kajian historis.

- Generasi tua masih menguasai bahasa Belanda

Penguasaan bahasa Belanda di kalangan generasi tua di Indonesia merupakan warisan langsung dari sistem kolonial Belanda, khususnya dalam bidang pendidikan dan administrasi sebelum dan sesaat setelah kemerdekaan. Generasi yang lahir dan tumbuh pada masa akhir pemerintahan Hindia Belanda atau pada masa transisi menuju kemerdekaan memperoleh pendidikan formal dengan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar, sehingga bahasa tersebut tertanam kuat dalam kehidupan intelektual mereka.

Pada masa kolonial, bahasa Belanda digunakan secara luas di sekolah-sekolah Eropa, sekolah pribumi elit, serta lembaga pendidikan menengah dan tinggi. Individu yang mengenyam pendidikan dalam sistem tersebut, terutama dari kalangan bangsawan, pegawai negeri, dan profesional seperti guru, dokter, dan ahli hukum, memiliki kompetensi bahasa Belanda yang baik. Kelompok inilah yang hingga kini masih ditemukan sebagai generasi tua yang menguasai bahasa Belanda.

Selain melalui pendidikan, penggunaan bahasa Belanda juga diperoleh melalui praktik kerja dan lingkungan profesional. Bahasa Belanda digunakan dalam administrasi pemerintahan, sistem hukum, dan dunia akademik hingga beberapa tahun setelah kemerdekaan Indonesia. Akibatnya, generasi tua yang terlibat dalam bidang-bidang tersebut tetap menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa kerja, terutama dalam membaca dokumen, arsip, dan literatur ilmiah. Namun, seiring berjalannya waktu, penguasaan bahasa Belanda di kalangan generasi tua semakin berkurang secara alami akibat faktor usia dan pergantian generasi. Bahasa Belanda tidak lagi diajarkan secara luas di sekolah-sekolah umum dan digantikan oleh bahasa Indonesia serta bahasa asing lain, seperti bahasa Inggris. Hal ini menyebabkan tidak terjadinya pewarisan bahasa Belanda secara berkelanjutan kepada generasi muda.



Dengan demikian, keberadaan generasi tua yang masih menguasai bahasa Belanda mencerminkan jejak sejarah kolonial dalam bidang pendidikan dan birokrasi Indonesia. Penguasaan bahasa tersebut kini lebih bersifat historis dan fungsional, terutama untuk kepentingan akademik, hukum, dan arsip, serta menjadi penanda peralihan dari masyarakat kolonial menuju bangsa Indonesia yang merdeka dan berdaulat secara bahasa.

Bahasa Belanda dalam kajian akademik dan arsip

- Arsip kolonial masih ditulis dalam bahasa Belanda

Sebagian besar arsip kolonial yang berkaitan dengan sejarah Indonesia ditulis dalam bahasa Belanda karena bahasa tersebut merupakan bahasa resmi administrasi pada masa VOC dan pemerintahan Hindia Belanda. Bahasa Belanda digunakan secara konsisten dalam pencatatan kegiatan pemerintahan, perdagangan, hukum, militer, dan pendidikan, sehingga meninggalkan warisan arsip yang sangat luas dan kompleks.

Arsip-arsip kolonial tersebut mencakup berbagai jenis dokumen, seperti laporan tahunan pejabat VOC, surat-menyurat antara pemerintah kolonial dan penguasa lokal, kontrak dagang, peraturan hukum, keputusan pengadilan, peta wilayah, sensus penduduk, serta catatan keuangan. Dokumen-dokumen ini ditulis dalam bahasa Belanda formal, sering kali menggunakan ejaan lama dan istilah administratif yang khas, sehingga memerlukan keahlian bahasa khusus untuk memahaminya.

Keberadaan arsip kolonial berbahasa Belanda memiliki nilai penting dalam penelitian sejarah dan hukum Indonesia. Arsip-arsip tersebut merupakan sumber primer yang memberikan informasi langsung tentang kebijakan kolonial, struktur pemerintahan, hubungan politik, dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat pada masa itu. Tanpa penguasaan bahasa Belanda, peneliti akan mengalami kesulitan dalam menafsirkan isi dokumen secara akurat dan utuh.

Hingga saat ini, arsip kolonial berbahasa Belanda masih tersimpan di berbagai lembaga arsip, seperti Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dan arsip-arsip di Belanda. Dalam praktik akademik, bahasa Belanda tetap digunakan dalam proses inventarisasi, katalogisasi, dan penerjemahan arsip. Oleh karena itu, kemampuan



membaca dan memahami bahasa Belanda menjadi keterampilan penting bagi sejarawan, arsiparis, dan peneliti hukum.

Dengan demikian, fakta bahwa arsip kolonial masih ditulis dalam bahasa Belanda menunjukkan keberlanjutan pengaruh bahasa tersebut dalam bidang akademik dan penelitian sejarah. Bahasa Belanda tidak lagi berfungsi sebagai bahasa komunikasi sehari-hari, tetapi tetap memiliki peran strategis sebagai bahasa sumber yang memungkinkan generasi masa kini memahami dan merekonstruksi sejarah kolonial Indonesia secara ilmiah dan bertanggung jawab.

- Pentingnya penguasaan bahasa Belanda bagi sejarawan

Penguasaan bahasa Belanda memiliki arti penting bagi sejarawan yang mengkaji sejarah Indonesia, khususnya periode kolonial. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa sebagian besar sumber primer mengenai sejarah Indonesia pada masa VOC dan Hindia Belanda ditulis dalam bahasa Belanda. Tanpa kemampuan memahami bahasa tersebut, sejarawan akan mengalami keterbatasan dalam mengakses, menafsirkan, dan menganalisis sumber-sumber sejarah secara akurat.

Bahasa Belanda menjadi kunci utama untuk membaca arsip kolonial seperti laporan tahunan VOC, surat-surat resmi pemerintah kolonial, kontrak dagang, peraturan hukum, catatan sensus, serta dokumen administrasi lainnya. Dokumen-dokumen ini memuat informasi langsung tentang kebijakan kolonial, struktur pemerintahan, kondisi sosial-ekonomi, dan dinamika politik pada masa itu. Penguasaan bahasa Belanda memungkinkan sejarawan memahami konteks, istilah teknis, serta nuansa makna yang sering kali tidak dapat diterjemahkan secara tepat ke dalam bahasa lain.

Selain itu, banyak karya historiografi awal tentang Indonesia ditulis oleh sejarawan dan sarjana Belanda. Karya-karya tersebut hingga kini masih menjadi rujukan penting dalam kajian sejarah Indonesia. Dengan menguasai bahasa Belanda, sejarawan dapat mengkaji literatur tersebut secara kritis, membandingkan perspektif kolonial dengan sumber-sumber lokal, serta menghindari ketergantungan pada terjemahan yang mungkin bersifat terbatas atau bias.

Penguasaan bahasa Belanda juga penting dalam proses kritik sumber sejarah.



Sejarawan dapat menilai keaslian, kredibilitas, dan tujuan penulisan suatu dokumen dengan lebih baik apabila mampu membaca teks asli. Hal ini membantu sejarawan mengidentifikasi bias kolonial, kepentingan politik, dan ideologi yang tersembunyi dalam narasi dokumen berbahasa Belanda. Dengan demikian, penguasaan bahasa Belanda bukan sekadar keterampilan *linguistik*, tetapi merupakan alat metodologis yang penting dalam penelitian sejarah Indonesia. Bahasa Belanda memungkinkan sejarawan mengakses sumber primer secara langsung, melakukan analisis yang lebih mendalam, dan menyusun rekonstruksi sejarah yang lebih objektif, kritis, dan bertanggung jawab secara ilmiah.

- Peran lembaga arsip nasional

Lembaga Arsip Nasional memiliki peran strategis dalam pelestarian, pengelolaan, dan pemanfaatan arsip sebagai sumber sejarah dan memori kolektif bangsa. Di Indonesia, fungsi tersebut dijalankan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) yang bertanggung jawab mengelola arsip statis peninggalan lembaga negara, termasuk arsip kolonial masa VOC dan Hindia Belanda.

Salah satu peran utama Lembaga Arsip Nasional adalah pelestarian arsip sejarah. Arsip kolonial yang sebagian besar ditulis dalam bahasa Belanda memiliki usia ratusan tahun dan rentan mengalami kerusakan fisik. ANRI melakukan konservasi dan restorasi arsip untuk menjaga keaslian dan keberlanjutan dokumen, sehingga dapat terus digunakan oleh generasi mendatang.

Selain pelestarian, Lembaga Arsip Nasional berperan dalam pengelolaan dan penataan arsip. Arsip-arsip kolonial diklasifikasikan, diinventarisasi, dan dideskripsikan secara sistematis agar mudah ditelusuri oleh peneliti. Dalam proses ini, pemahaman terhadap bahasa Belanda sangat penting karena judul, isi, dan konteks dokumen masih menggunakan bahasa tersebut.

Peran lainnya adalah penyediaan akses bagi peneliti dan masyarakat. ANRI membuka layanan penelitian arsip bagi sejarawan, akademisi, mahasiswa, dan publik. Melalui akses ini, arsip kolonial dapat dimanfaatkan sebagai sumber primer dalam penulisan sejarah, kajian hukum, dan penelitian sosial-budaya. Digitalisasi arsip juga dilakukan untuk memperluas akses dan mengurangi risiko kerusakan dokumen asli.



Lembaga Arsip Nasional juga berperan dalam pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan. ANRI menyelenggarakan pelatihan, pameran arsip, serta kerja sama dengan perguruan tinggi dan lembaga penelitian. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran akan pentingnya arsip serta mendorong penelitian berbasis sumber primer, termasuk arsip berbahasa Belanda.

Dengan demikian, Lembaga Arsip Nasional berperan sebagai penjaga memori sejarah bangsa dan penghubung antara masa lalu dan masa kini. Melalui pelestarian, pengelolaan, dan pemanfaatan arsip kolonial, lembaga ini mendukung upaya penulisan sejarah Indonesia yang ilmiah, kritis, dan berbasis bukti autentik.

Perkembangan Bahasa Belanda di Indonesia menunjukkan bahwa bahasa memiliki peran sentral dalam proses kolonialisasi. Bahasa Belanda tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai instrumen kekuasaan yang digunakan untuk menanamkan, mengontrol, dan mewariskan dominasi kolonial. Hal ini memperlihatkan bahwa kolonialisme tidak hanya menekankan aspek politik dan ekonomi, tetapi juga membentuk lanskap *linguistik* yang kompleks di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga menegaskan bahwa warisan kolonial masih dapat ditelusuri hingga masa kini melalui kosakata serapan bahasa Belanda yang tetap digunakan dalam bahasa Indonesia modern. Kosakata serapan ini memperkaya bahasa Indonesia, tetapi sekaligus menjadi pengingat akan dominasi kolonial yang pernah terjadi. Dengan penekanan kuat pada bahasa Belanda selama periode kolonial, bahasa Indonesia dibentuk oleh bahasa dan budaya Eropa.

Upaya untuk mempromosikan keberagaman *linguistik* dan melestarikan bahasa daerah sangat penting dalam mengatasi ketidaksetaraan ini dan merebut kembali wawasan budaya Indonesia. Penggunaan kata serapan dan frasa bahasa Belanda telah membentuk Bahasa Indonesia, tetapi negara ini sekarang merangkul. Standarisasi bahasa Indonesia penting untuk berkomunikasi tetapi tidak boleh dilakukan dengan menggunakan bahasa daerah yang lainnya. Dengan mempromosikan pelestarian dan penggunaan berbagai bahasa, Indonesia dapat benar-benar mencerminkan tenun budaya yang kaya yang membentuk bangsa ini. Dengan demikian, negara dapat menumbuhkan



rasa bangga dan identitas yang lebih besar di kalangan rakyatnya, sekaligus memberikan pemahaman dan rasa hormat terhadap tradisi *linguistik* yang bertahan Belanda.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan kolonial Belanda memiliki pengaruh besar terhadap evolusi bahasa di Indonesia. Bahasa Belanda dijadikan instrumen kekuasaan dan pendidikan, meninggalkan jejak *linguistik* yang bertahan hingga saat ini. Namun, dari tekanan kolonial tersebut lahir kesadaran nasional yang memperkuat posisi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan identitas bangsa. Dengan memahami warisan kolonial ini, kita dapat melihat bagaimana bahasa Indonesia terbentuk melalui proses historis yang panjang, penuh dinamika, dan sarat akan perjuangan. Kesadaran akan sejarah *linguistik* ini penting untuk memperkuat kedaulatan budaya, menjaga keragaman bahasa, serta menegaskan identitas nasional Indonesia dalam konteks kontemporer.

4. Kesimpulan

Bahasa Belanda memiliki peran yang signifikan dalam perjalanan sejarah Indonesia, terutama pada masa kolonial VOC dan pemerintahan Hindia Belanda. Bahasa ini tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai instrumen kekuasaan yang digunakan dalam bidang administrasi, hukum, pendidikan, perdagangan, dan diplomasi. Melalui kebijakan kolonial, bahasa Belanda ditempatkan sebagai bahasa resmi yang hanya dapat diakses oleh kalangan tertentu, sehingga menciptakan stratifikasi sosial dan ketimpangan linguistik di tengah masyarakat kolonial.

Masuknya bahasa Belanda ke Nusantara berlangsung melalui perantara bahasa Melayu yang telah berfungsi sebagai *lingua franca*. Interaksi antara kedua bahasa tersebut melahirkan proses kontak bahasa yang intensif dan berkelanjutan, yang berdampak pada penyerapan kosakata Belanda ke dalam bahasa Melayu dan kemudian bahasa Indonesia. Dengan demikian, meskipun bahasa Belanda tidak menjadi bahasa mayoritas, pengaruhnya tetap melekat dalam perkembangan bahasa Indonesia modern, khususnya dalam bidang hukum, administrasi, dan teknologi.

Dalam bidang pendidikan, bahasa Belanda berperan sebagai sarana pembentukan



elite terdidik pribumi. Penguasaan bahasa Belanda memungkinkan tokoh-tokoh pergerakan nasional mengakses pendidikan tinggi dan pemikiran modern, sekaligus memanfaatkannya sebagai alat perlawanan intelektual terhadap kolonialisme. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa Belanda tidak hanya berfungsi sebagai alat dominasi, tetapi juga secara paradoks menjadi medium perjuangan nasional.

Pasca kemerdekaan, penggunaan bahasa Belanda mengalami penurunan drastis seiring dengan penguatan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan simbol identitas bangsa. Namun demikian, bahasa Belanda tetap memiliki peran penting dalam bidang hukum dan akademik, terutama dalam kajian sejarah dan pengelolaan arsip kolonial. Penguasaan bahasa Belanda masih diperlukan untuk memahami sumber-sumber primer yang menjadi dasar rekonstruksi sejarah Indonesia secara ilmiah.

Dengan demikian, bahasa Belanda merupakan bagian dari warisan kolonial yang memiliki dampak kompleks dalam sejarah Indonesia. Meskipun tidak lagi digunakan secara luas, jejak dan fungsinya tetap relevan dalam konteks keilmuan, hukum, dan historiografi. Pemahaman terhadap peran bahasa Belanda membantu memperkaya perspektif kritis dalam melihat dinamika kolonialisme serta proses pembentukan identitas nasional Indonesia.

Daftar Pustaka

- Aizid, R. (2025). *Sejarah Lengkap Kolonial Di Nusantara: Portugis, VOC, Hindia Belanda, dan Inggris*. IRCiSoD.
- Basri, M., Ayu, S. N., Nabilla, G., & Berutu, S. L. (2024). Background to the arrival of the Dutch, VOC, Dutch East Indies. *EDUCTUM: Journal Research*, 3(1), 21–26.
- Cahyaningrum, N. A. Z. (2024). *Perancangan Informasi Sejarah Jalur Rempah Nusantara Melalui Media Board Game* (Skripsi). Universitas Komputer Indonesia.
- Dhohirrobbi, A. (2024). Sejarah VOC di Indonesia. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 2(10), 321–329.
- Faturrohman, A., et al. (2025). Politik bahasa dan pendidikan kolonial di Hindia Belanda. *Jurnal Sejarah dan Budaya*, 7(1), 45–62.



- Firdiyansyah, M. (2024). *Pendidikan kolonial dan kontrol sosial di Indonesia. Jurnal Pendidikan Sejarah*, 5(2), 88–101.
- Karina, D., et al. (2024). Politik *divide et impera* dalam kebijakan bahasa kolonial. *Jurnal Sosial Humaniora*, 6(1), 33–47.
- Musliati, M., Aulia, C., & Erwinsyah, E. (2023). Perkembangan sosial masyarakat pada masa penjajahan. *Jurnal Tips: Jurnal Riset, Pendidikan, dan Ilmu Sosial*, 1(2), 104–116.
- Pasaribu, R., et al. (2024). Bahasa dan nasionalisme dalam pendidikan kolonial. *Jurnal Pendidikan dan Sejarah*, 4(1), 15–29.
- Rosmaida, S., et al. (2025). Politik etis dan transformasi pendidikan kolonial. *Jurnal Sejarah Indonesia*, 9(1), 1–14.
- Sinaga, R., Fahlevi, T. R., Lumbantoruan, R. G., & Berutu, H. (2024). Kongsi dagang Inggris (EIC) dan Belanda (VOC). *AR-RUMMAN: Journal of Education and Learning Evaluation*, 1(2), 521–528.
- Syarifah, N., et al. (2024). Bahasa Melayu sebagai *lingua franca* di Nusantara. *Jurnal Linguistik Nusantara*, 3(2), 60–75.